

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Maksudnya terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, pandangan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.<sup>1</sup>

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Sampah akan

---

<sup>1</sup>Ricki M. Mulia, 2005, Kesehatan Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 5

berdampak pada pencemaran lingkungan, dimana jumlah penduduk yang besar akan berdampak pada jumlah sampah yang akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beragam aktivitas manusia yang dapat menimbulkan adanya sampah dan secara tidak langsung sampah yang dihasilkan semakin beragam pula jenisnya.

Masyarakat pada umumnya melakukan pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir sampah (*end of pipe*). Padahal, setiap masyarakat memiliki volume sampah yang besar dan apabila diangkut menjadi satu akan menciptakan timbulan sampah yang besar dan berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>). Hal tersebut berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu, dimana masyarakat harus “memilah berdasarkan jenisnya”. Artinya, memilah berbagai jenis sampah ke dalam tempat yang berbeda sejak awal. Jika tidak, tong sampah dan kantong sampah yang berisi sampah campuran harus dipilah setelahnya, namun proses ini akan lebih sulit, kotor, dan berbahaya.

Kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan mengenai

paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi jumlah gunung sampah di TPA Piyungan Bantul. Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Metode pengelolaan sampah yang dimaksud adalah manajemen bank sampah.

Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja kesehatan lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali. Maka dari itu istilah tersebut dinamakan bank sampah, karena arti kata dari bank adalah tempat menyimpan sementara, dan bank sampah adalah tempat menyimpan sementara sampah untuk dipisahkan sesuai macamnya.

Pengelolaan sampah yang merangkul elemen masyarakat melalui program pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu, merupakan metode edukasi pemilahan sampah terpadu bagi masyarakat. Tidak hanya mengurangi timbulan sampah di lingkungan sekitar namun masyarakat juga dapat mendapatkan manfaat secara materi dan moral dari pengelolaan sampah tersebut. Salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang berhasil menjalankan dan menerapkan program Bank Sampah adalah Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul melalui prakarsa Kelompok Pengelola Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria”.

Tidak hanya berhasil dalam pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah, dusun ini mampu mengelola lingkungannya yang berbasis pada masyarakat, swakelola ketahanan pangan organik, pertanian, perikanan, peternakan dan kreasi daur ulang sampah. Hal ini di buktikan dengan adanya lahan-lahan sempit yang dimanfaatkan oleh warga untuk menanam sayuran, buah secara organik. Untuk mesiasati lahan yang sempit masyarakat menggunakan media tanam hidroponik atau menggunakan media plastik polybag untuk tanaman sayur. Ini dibuat dari sampah plastik yang oleh ibu-ibu di setrika kemudian menjadi polybag.<sup>2</sup>

Pentingnya sebuah imeplementasi kebijakan bagi pemerintah untuk menjalankan program tetang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Hal ini, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat melalui kelompok paguyuban yang berorientasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah membuat sebuah gagasan atau ide tentang pembuatan bank sampah. Dimana masyarakat Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul dapat menabung sampah rumah tangga mereka yang sudah dipisahkan sesuai dengan kriteria sampah masing-masing.

Akan tetapi, dalam menjalankan sebuah program tentunya ada sebuah hambatan atau kendala yang akan dihadapi oleh kelompok ini. Hambatan-

---

<sup>2</sup> Zaenal Mutakim, SH. (2013,29 November). Sumilir Nama Gang ku. Tulisan (Online) Tersedia: <http://sehatceria02.staff.uui.ac.id/2013/11/29/sumilir-nama-gang-ku/> Diakses Pada 24 Juni 2014

hambatan tersebut diantaranya adalah pertama kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berorganisasi. Kedua partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih kurang. Ketiga sumber daya manusia yang masih rendah. Dan terakhir peran serta atau dukungan dari pemerintah belum maksimal. Selain hambatan tersebut, maka muncul adanya faktor pendukung dalam kelompok pengelolaan sampah ini. Diantaranya yaitu, Peran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mendampingi kelompok ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyuluhan mengenai bank sampah pada kelompok ini, selain itu Badan Lingkungan Hidup mempunyai peran penting dalam mensukseskan turunnya dana pengembangan pengelolaan sampah pada kelompok ini. Faktor pendukung lainnya adalah adanya mitra atau kerja sama dengan pihak-pihak swasta yang bergerak baik dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Program seperti ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan menumbuhkan budaya hidup sehat melalui lingkungan yang bersih dan asri. Sehingga ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah topik penelitian, karena Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul merupakan suatu kebijakan yang membuat masyarakat setempat dapat mendapatkan berbagai keuntungan dalam berbagai bidang terkait bank sampah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokembang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul?
- b. Bagaimana prosedur pengelolaan sampah yang ideal berdasarkan KPLM Sehat Ceria?
- c. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokembang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokembang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.
- b. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan sampah yang ideal berdasarkan KPLM Sehat Ceria.

- c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokembang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik, khususnya yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang pelaksanaan kebijakan di daerah.

##### **2. Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu sosial dan politik yang diperoleh selama bangku kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait

dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## **1.5 Kerangka Dasar Teori**

Untuk memahami lebih lanjut mengenai uraian diatas, maka penulis menggunakan landasan teori. Berikut ini merupakan definisi teori menurut Kerlingger teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>3</sup>

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dan arena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka berikut ini merupakan landasan dasar penelitian menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### **1. Pengertian Kebijakan**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan

---

<sup>3</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hal.14.

<sup>4</sup> Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hal.30.



pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.<sup>5</sup>

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

## **2. Bentuk kebijakan publik**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut<sup>6</sup>:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Tap MPR

---

<sup>5</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, teori dan proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal 14

<sup>6</sup> Rian Nugroho. *Public Policy*. PT Elek Media Komptindo. Jakarta. 2009. hal 130

- 3) Undang-Undang/Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan daerah provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketujuh produk diatas termasuk bentuk pertama kebijakan publik, yaitu peraturan perundang-perundangan yang termodifikasi “Nasional” hingga tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan publik karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya, dan karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik.

Jadi rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian dalam pemahaman kontinentlas, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu<sup>7</sup>:

- a) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yang disebut diatas.
- b) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati dan pertutran walikota. Kebijakannya dapat

---

<sup>7</sup> Ibid hal 131

pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar-  
menteri, gubernur, bupati atau wali kota.

- c) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

### **3. Proses Kebijakan**

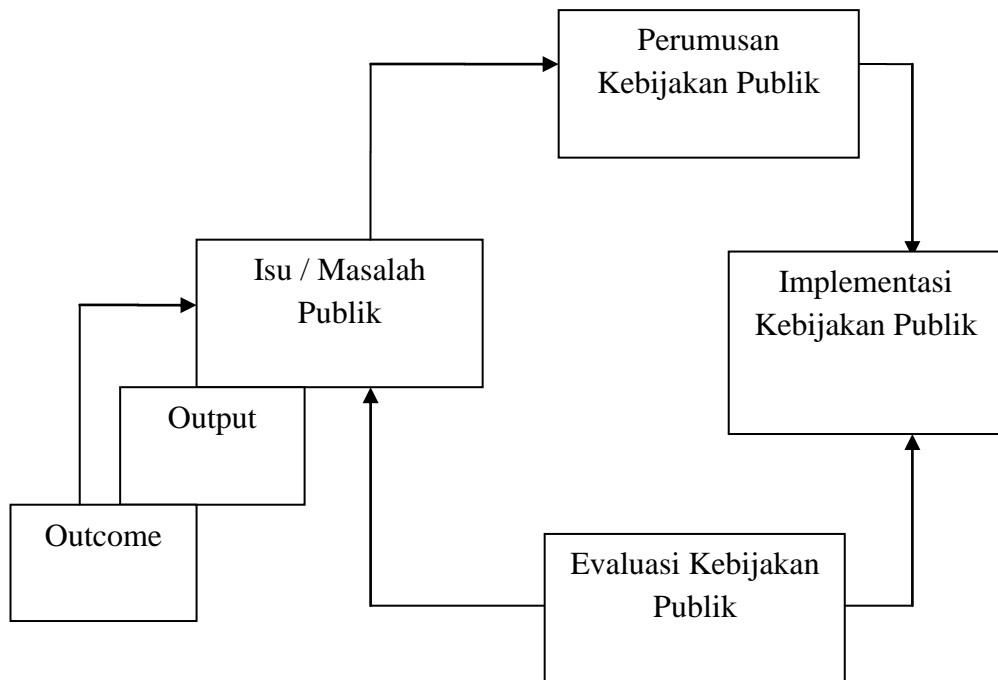
Proses kebijakan merupakan keseluruhan aktivitas atau tindakan-tindakan dari mana kebijakan pemerintah itu dibuat. Memang tidak mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar. Dibawah ini skematik dari kebijakan publik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rian Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.*, Gramedia, Jakarta, 2003. hal 74

**Gambar 1.1**

**Skema Proses Kebijakan**



Sumber : Rian D Nugroho *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta, 2003. Hal 74

Dari alur skematik diatas adapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

- 1) Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh seseorang, dan memang harus diselesaikan.

- 2) Isu ini diangkat sebagai isu politik yang memang harus diselesaikan.
- 3) Isu ini diangkat sebagai agenda politik yang harus diselesaikan. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- 4) Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- 5) Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan adanya tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru bagi penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan di implementasikan dengan baik dan benar.
- 6) Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri bermanfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- 7) Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Bantul maka penerapan kebijakanpun tidak akan terlepas dari bagaimana kesadaran masyarakat dalam menerimanya dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

##### **a. Konsep Implementasi Kebijakan**

Dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 102

## **b. Model Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-m asalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi<sup>10</sup>.

### **1. Model Van meter dan Van Horn**

Menurut Meter dan Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:<sup>11</sup> Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

- a. Karakteristik agen pelaksana/implementor
- b. Kondisi ekonomi
- c. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementator.

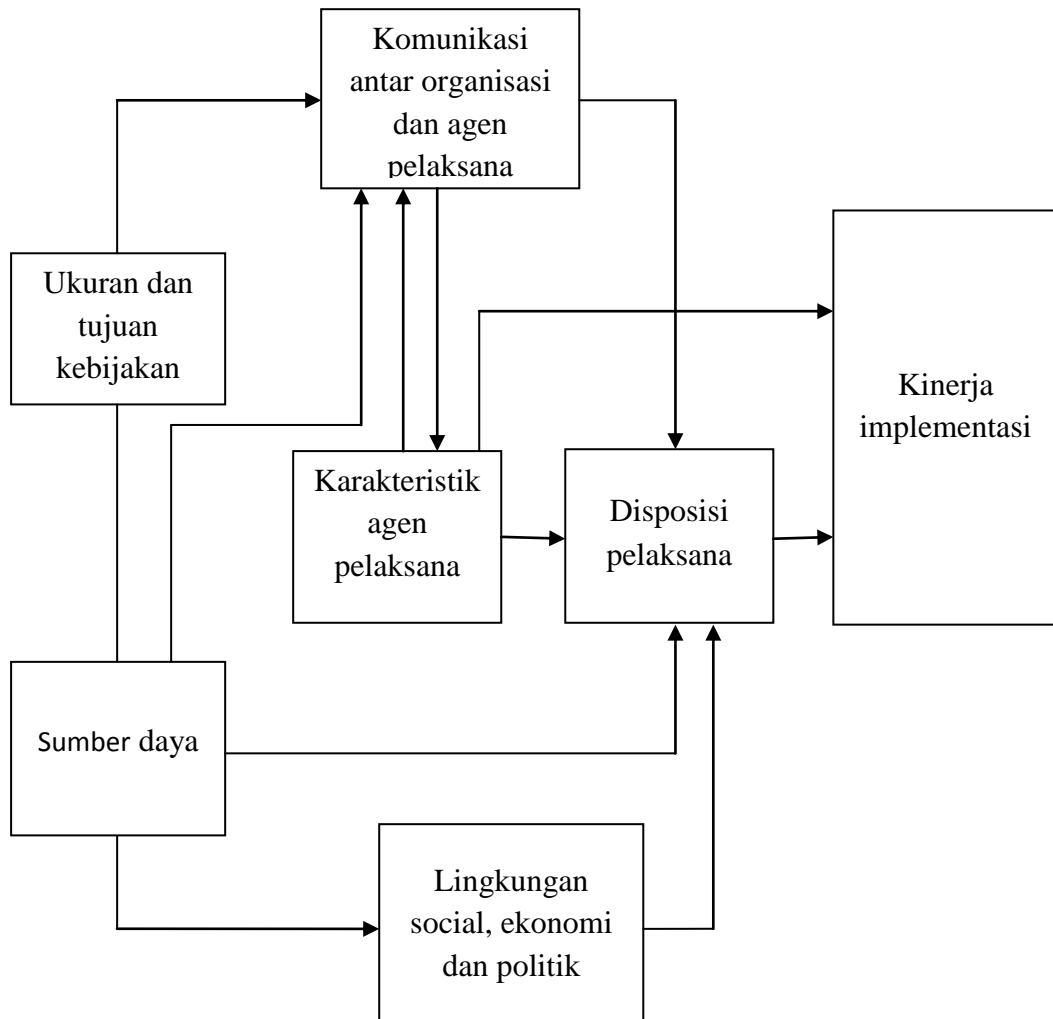
---

<sup>10</sup> Rian Nugroho. *Public Policy*. PT Elek Media Komptindo. Jakarta. 2009. hal 681

<sup>11</sup> Ibid. hal 503

**Gambar 1.2**

**Model Van Meter dan Van Horn**



Sumber: Subarsono,A.G. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005, hal. 99

## 2. Model Mazmania dan Paul A. Sabatier

Menurut Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian menyatakan ”bahwa analisis implementasi kebijakan negara



adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi". Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain yaitu:<sup>12</sup>

- a. Keberhasilan implementasi akan dapat ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan.
- b. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Faktor-faktor di luar peraturan, yaitu mempengaruhi langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya.

---

<sup>12</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balai Pustaka Jakarta, 1997, hlm 81

### 3. Model Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (1978) menyatakan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:<sup>13</sup>

- a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan.
- c. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benarbenar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak yang luas.
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.

---

<sup>13</sup> Op,Cit. hal 506

- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya jika hubungan ketergantungan tinggi, implementasinya tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.

#### 4. Model Grindle

Menurut Grindle (1980:7), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:<sup>14</sup>

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- b. Derajat perubahan yang diinginkan,
- c. Kedudukan sebuah kebijakan,
- d. (Siapa) pelaksana program, Sumber daya yang dikerahkan

---

<sup>14</sup> Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994

Sementara itu , konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tangkap

Keunikan model Gringle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

#### 5. Model Edward

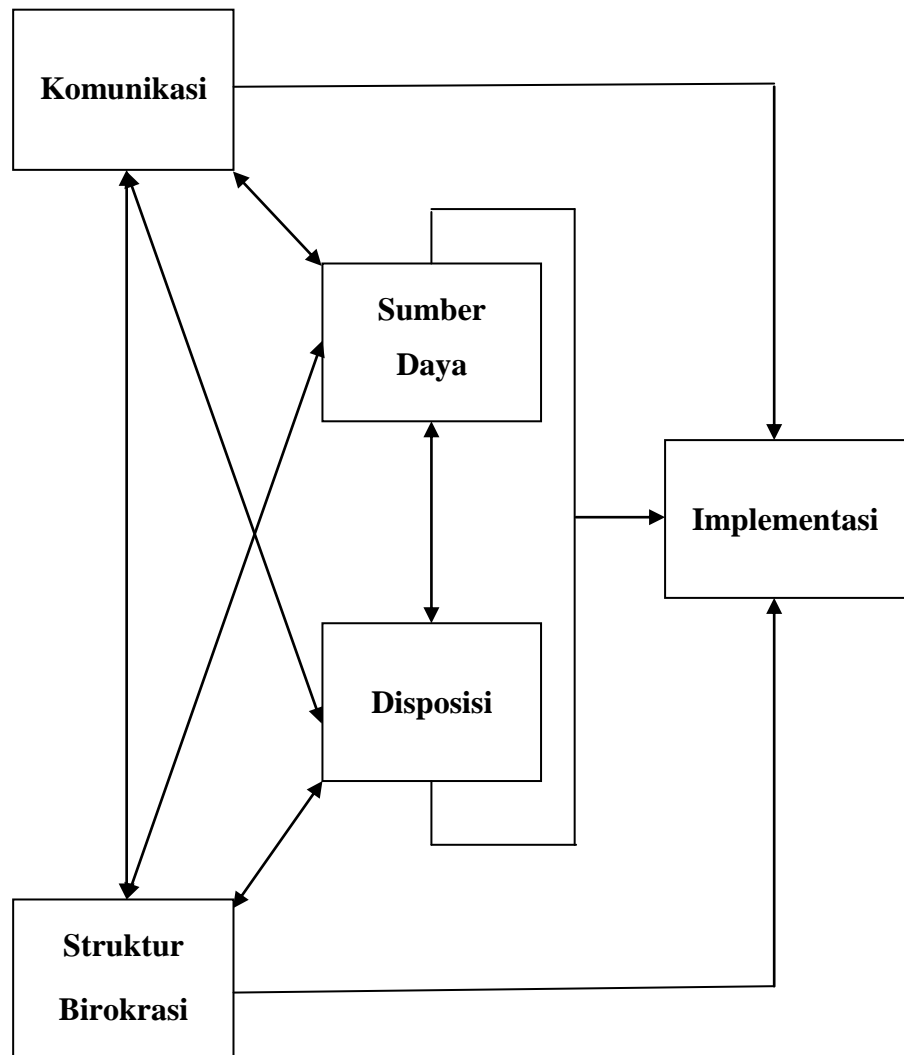
George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal 149.

**Gambar 1.3**

**Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III)**



Sumber: Leo Agustino Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012, hal 150

## 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 150

adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan

kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf, karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 151



mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.<sup>18</sup>

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 152

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>19</sup>

Dua karakteristik, menurut George C. Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian,

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 153

dengan mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Selain itu, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sehingga faktor-faktor yang cocok untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Disamping itu teori George C. Edward III ini lebih mudah di pahami oleh peneliti sehingga teori yang akan di gunakan sebagai penelitian akan mudah untuk di jalankan oleh peneliti, karena menurut peneliti bahwa teori ini sudah cukup jelas dan simpel.

## **5. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>20</sup> Pengelolan sampah ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Kegiatan penanganan sampah meliputi:

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pasal 1 Ayat 15

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah,
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu,
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir,
- 4) Pengolahan dalam bentuk meng-ubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah,
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **1.6 Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha, organisasi, dan atau instansi tertentu untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan.
2. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan Negara yang telah disahkan, agar apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan nyata sesuai dengan rencana yang ada baik yang menyangkut akademis administrasi maupun usaha yang memberikan dampak pada masyarakat.
3. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pe-ngurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### **1.7 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian. Agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya, maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian dengan kata lain variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang sudah dicermati.”<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis merujuk ada teori implementasi kebijakan George Edward III. Dimana dalam teori ini, Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan

---

<sup>21</sup>Masri singarimbun dan Sofiyon, Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta, 1989, hal.174.

Struktur Birokrasi. Dari ke empat isu tersebut sehingga dapat disimpulkan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi sebuah kebijakan. Dari empat isu pokok tersebut, yang akan peneliti kaji dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

1. Komunikasi

- a. Kebijakan ditransmisikan secara tepat dan benar.
- b. Petunjuk-petunjuk kebijakan dikomunikasikan secara jelas.
- c. Petunjuk/instruksi kebijakan disampaikan secara konsisten.

2. Sumber Daya

- a. Adanya staf yang cukup dan sesuai kualifikasi/berkompeten.
- b. Tersedianya informasi yang memadai terkait kebijakan.
- c. Adanya kewenangan yang dimiliki pelaksana kebijakan secara jelas.
- d. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Dipoition

Kesediaan dan komitmen dari pelaksana kebijakan untuk mensukseskan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

- a. Adanya SOP yang jelas dan mudah dipahami.
- b. Adanya fragmentasi dengan pihak/instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan.



## **1.8 Metode Penelitian**

Sebuah penelitian dalam prosesnya melalui beberapa tahapan. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, maka dalam sebuah penelitian memakai sebuah metode/metodologi. Metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dalam ilmu pengetahuan berfungsi sebagai cara kerja yang membuktikan kebenaran ilmiah atau menjawab pertanyaan secara ilmiah.

Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu harus memiliki metode, karena dalam mengungkapkan kebenaran obyektif atas obyek ilmu yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu pun dengan penelitian ini menggunakan metodologi agar penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan baru yang dapat di buktikan secara ilmiah. Beberapa unsur yang masuk dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>22</sup>. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah<sup>23</sup>.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul. Lokasi ini diambil menjadi objek penelitian karena pada wilayah tersebut merupakan wilayah yang sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

## 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisa yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Dalam sebuah penelitian mutlak membutuhkan data sebagai unit analisa yang didapat dari obyek penelitian sehingga penelitian tersebut dapat diambil

---

<sup>22</sup> Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 6

<sup>23</sup> Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Hal 20

kesimpulannya dan mudah untuk dipelajari dalam menentukan jalan keluar sebuah masalah yang masih dalam proses penelitian.

Didalam penelitian ini peneliti membutuhkan data dari berbagai sumber untuk menunjang hasil penelitian, diataranya sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka, sebagai landasan teori serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti melalui media massa, internet, undang-undang serta dokumen terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Dalam

pembahasan ini akan dijelaskan cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian atau pun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa. Manfaat dari teknik ini adalah menjelaskan masalah sampai sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini pihak-pihak yang diwawancarai adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, ketua Kelompok Pengelola Lingkungan Mandiri “Sehat Ceria” Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Contoh sumber data : dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, internet, dan sebagainya.

### c. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Yang akan di amati disini adalah Pengelolaan Sampah di Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data secara berurutan dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar mudah untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta, dan informasi yang didapat dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul di antara masyarakat.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa feomena sehari-hari di masyarakat yang di tulis oleh peneliti baik berupa perkataan yang tertulis maupun hubungan lisan orang-orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Menurut Winarno Surachmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah “Memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan,

pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.”<sup>24</sup>

Pada teknik analisa kualitatif peneliti berada pada posisi di masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap ketimpangan sosial, lalu data-data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dalam bentuk tulisan atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data-data yang diinterpretasikan adalah data berupa naskah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian sesuai dengan ketentuan metodologi yang ada.

Dalam menyusun suatu penelitian proses analisa data dapat menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu :

- Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya,
- Membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

---

<sup>24</sup>Winarno Surachman, *Dasar-Dasar Teknik Research*, Tarsita, Bandung, 1978, hal.120.

- Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.
- Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Suatu penelitian memperoleh data-data sebagai obyek kajian penelitian sehingga perlu untuk di sederhanakan supaya mudah untuk dipahami, ini merupakan dasar tuntunan dari analisis data. Dalam pembahasan ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Dusun Selokambang-Durenan Rt 02 Dk II Gatak Tamantirto Kasihan Bantul?, maka disini penulis menggunakan model analisa kualitatif, dengan mendeskripsikan situasi yang ada dan menfokuskan pada pemecahan-pemecahan masalah, peneliti bertindak sebagai obyek yang berada di antara masyarakat supaya bisa merasakan situasi yang sebenarnya terjadi sehingga dalam menganalisis suatu masalah dapat lebih mudah.